

## PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAERAH YANG BERORIENTASI PADA KEMANDIRIAN AUDIT

**Kholid Haryono, ST<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Informatika, Konsentrasi Sistem Informasi Enterprise  
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km. 14 Yogyakarta 55501  
Telp. (0274) 895287 ext. 122, Faks. (0274) 895007 ext. 148  
E-mail: kholidmail@yahoo.com

### ABSTRAKS

Lahirnya PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mulai berlaku sejak tahun 2006 membuat seluruh perangkat pemerintahan berusaha menjalankan prinsip-prinsip yang termuat dalam SAP tersebut, sayangnya masih banyak staf dan pejabat akuntansi pemerintahan yang tidak memiliki latar belakang akuntansi sehingga pelaksanaannya menjadi kendala. IT sebagai bidang komputerisasi seharusnya mampu menjembatani kendala tersebut dengan melakukan otomasi terhadap aktifitas-aktifitas akuntansi yang dimasukkan kedalam aktifitas transaksional petugas sehingga operasional harian akan otomatis membentuk jurnal-jurnal akuntansi tanpa disadari oleh petugas. Diperlukan pula fasilitas untuk menelusuri seluruh nilai yang muncul dalam laporan guna memudahkan petugas melakukan audit secara mandiri sebelum laporan keuangan diserahkan ke auditor external dan DPRD.

*Kata Kunci: sistem informasi, akuntansi keuangan daerah, udit*

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tahun 2003 telah lahir UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah yang merupakan tonggak sejarah lahirnya PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini penting mengingat tanpa standar tersebut, pemerintah tidak memiliki dasar dan acuan standar pemeriksaan keuangan.

Satu tahun berikutnya, lahir Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Kepmendagri No 29 tahun 2002. Pedoman tersebut menjelaskan secara rinci tugas, wewenang dan prosedur-prosedur tatalaksana keuangan daerah yang lengkap dengan lampiran dan dokumen-dokumen operasional mengenai pengelolaan keuangan daerah. Satu tahun berikutnya, peraturan ini direvisi dengan terbitnya Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006.

Penjabaran lebih rinci tentang tugas bendahara dalam pengelolaan tatausaha dan pelaporannya diatur lebih detail melalui Permendagri No. 55 tahun 2008 sebagai dasar pembukuan bendahara untuk kemudian di akuisisi oleh bagian akuntansi dan pelaporan sesuai PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai lembaga publik, pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara benar melalui pengesahan sebuah badan yang bertugas melakukan auditing / pemeriksaan keuangan daerah, lembaga tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai

badan Negara yang independen, BPK melakukan audit secara komprehensif dan memberikan opini mengenai tingkat kewajaran laporan tersebut sebelum dilaporkan ke DPR.

#### 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

- (1) Meneliti tentang prosedur-prosedur dan bagan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 55 tahun 2008 kemudian memformulasikan dalam bentuk form transaksi.
- (2) Meneliti tentang prosedur-prosedur dan bagan pelaporan keuangan daerah berdasarkan PP 24/2005 kemudian memformulasikan dalam bentuk output dan audit trial.
- (3) Meneliti tentang konversi bagan pengelolaan keuangan antara Permendagri No. 13 tahun 2006 dan penyajian laporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada PP 24/2005.
- (4) Menganalisis dan merancang system informasi akuntansi sektor publik yang memudahkan pengelola keuangan daerah dalam melakukan operasional keuangan dan otomasi pelaporan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang termuat dalam PP 24/2005.
- (5) Membuat Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi yang dapat digunakan untuk melakukan *self auditing* (audit secara mandiri) untuk menghadapi auditor external pada laporan akhir keuangan daerah

### 1.3 Tujuan dan Manfaat

#### (1) Tujuan

- a) Merancang system informasi akuntansi sektor publik yang dapat membantu pengelola keuangan dalam melakukan jurnal-jurnal akuntansi otomatis dan membuat laporan akhir keuangan daerah.
- b) Merancang system yang dapat memberikan kemudahan bagi pengelola keuangan dalam melakukan audit secara mandiri terhadap operasional keuangan yang dikelolanya.
- c) Merancang system yang dapat melakukan interaksi data melalui query SQL untuk mendapatkan data-data keuangan yang spesifik dan mendalam untuk kepentingan audit.

#### (2) Manfaat

- a) Memudahkan pengelola keuangan daerah dalam melakukan pencatatan-pencatatan akunting tanpa harus melakukan jurnal secara manual.
- b) Memudahkan pejabat pengguna anggaran dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memudahkan pengelola keuangan dalam melakukan audit secara mandiri terhadap proses pengelolaan internal sebelum laporan dikeluarkan ke badan pemeriksa maupun pertanggungjawaban di DPR-D.

- b) *Prosedur-prosedur*, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
- c) *Data* tentang proses-proses bisnis organisasi.
- d) *Software* yang dipakai untuk memproses data organisasi.
- e) *Infrastruktur* teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Sistem Informasi Akuntansi berfungsi untuk kepentingan organisasi dalam hal :

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (*review*) hal-hal yang telah terjadi.
- b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal..

### 1.4 Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan perancangan system menggunakan OOAD (*Object Oriented Analysis dan Design*) dengan desain object menggunakan *UML Class Diagram* dan *Use Case Diagram*.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Definisi

Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hamper selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk dan mendukung bagi system yang lebih besar, tempat mereka berada.

Sistem Informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk menerima masukan, melakukan pemrosesan, menciptakan keluaran, melakukan kontrol dan penyimpanan untuk merubah data menjadi suatu informasi yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, pembuatan keputusan dan pendukung aktivitas operasional organisasi [Bocij, 1999]

Sistem Informasi Akuntansi adalah sekumpulan komponen yang terdiri dari :

- a. *Orang-orang* yang mengoperasikan system tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.

### 2.2 Audit Sektor Publik

Audit adalah suatu proses sistematis dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan (*assertion*) tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan audit laporan keuangan adalah, untuk menunjukkan, dengan dasar yang cukup dan tepat dari bukti-bukti audit, apakah laporan keuangan telah menyajikan dengan benar dan wajar posisi keuangan pemda, hasil dari operasi, dan perubahan-perubahannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Dasar yang digunakan dalam audit keuangan daerah adalah UU No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan standar akuntansi yang digunakan dalam audit keuangan daerah adalah PP 24/2005 dan petunjuk teknis, buletin dan jurnal yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

### 2.3 Profil Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelola keuangan daerah berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 dan refisinya melalui Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah.
- Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD dalam menjalankan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran yang disebut juga kepala dinas.
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang mengelola anggaran tingkat SKPD.

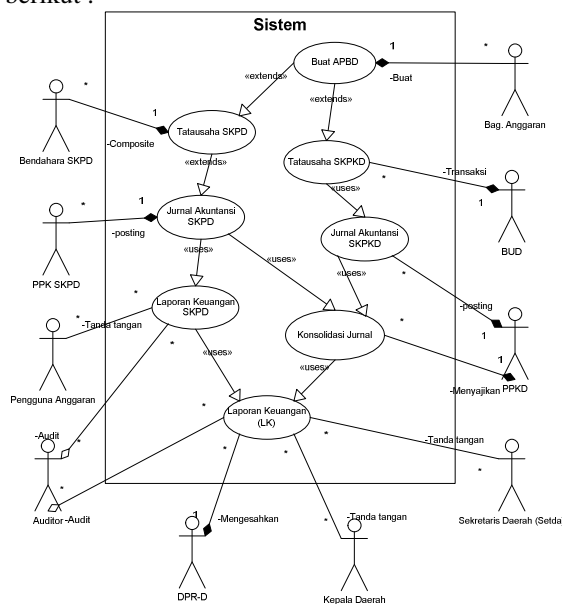
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang secara fungsional bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD dan secara administratif kepada kepala SKPD.

### 3. ANALISIS PROSES BISNIS

Analisis proses pengelolaan keuangan dan pelaporan daerah digambarkan dalam *use case diagram* dan *class diagram* berikut :

#### 3.1 Proses Kerja Sistem

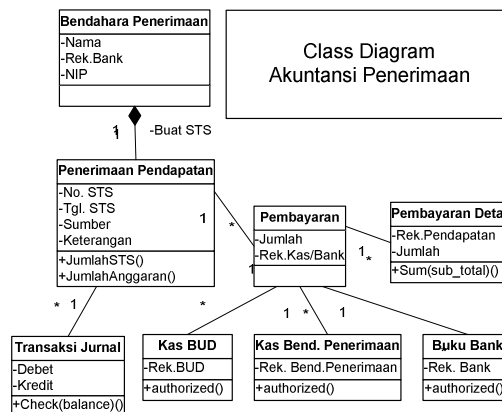
*Use case diagram* adalah suatu diagram yang menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah system. Proses kerja system akuntansi keuangan daerah tergambar dalam *use case diagram* berikut :



Gambar 1 : *use case diagram* sistem

### 3.2 Proses Akuntansi Penerimaan

*Class Diagram* adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. *Class* menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). *Class Diagram* akuntansi penerimaan adalah sebagai berikut :

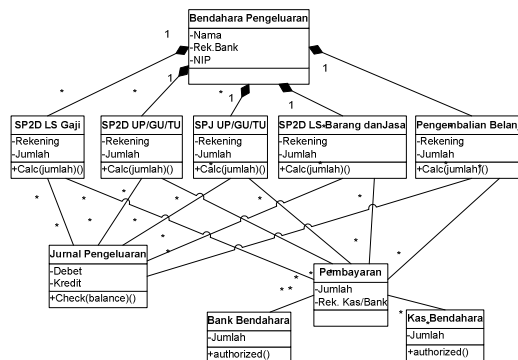


Gambar 2 : *Class Diagram* akuntansi penerimaan

Keterangan :

- ✓ STS : Surat tanda setoran, yakni bukti transaksi yang dikeluarkan oleh bendahara penerimaan.
- ✓ BUD adalah bendahara umum daerah

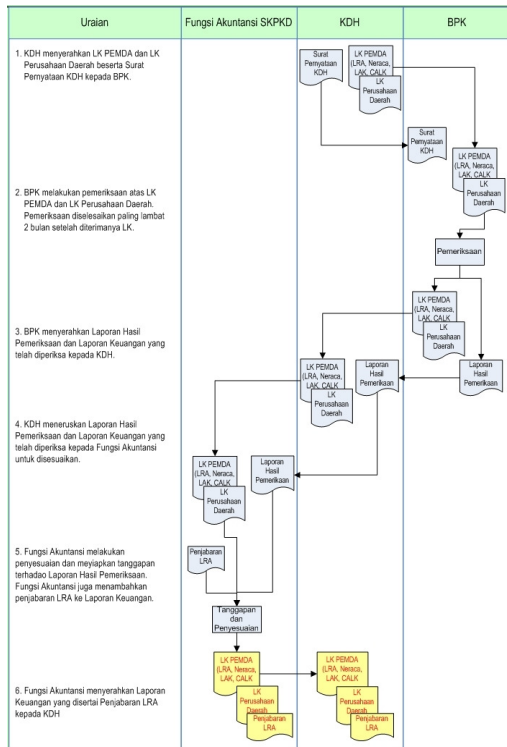
### 3.3 Proses Akuntansi Belanja



Gambar 3 : *Class Diagram* akuntansi pengeluaran

### 3.4 Proses Pelaporan Keuangan Daerah

Diagram flow pelaporan keuangan daerah sampai di badan pemeriksa keuangan (BPK) adalah sebagai berikut :



Gambar 4 : Diagram pelaporan keuangan daerah

#### 4. DESAIN SISTEM

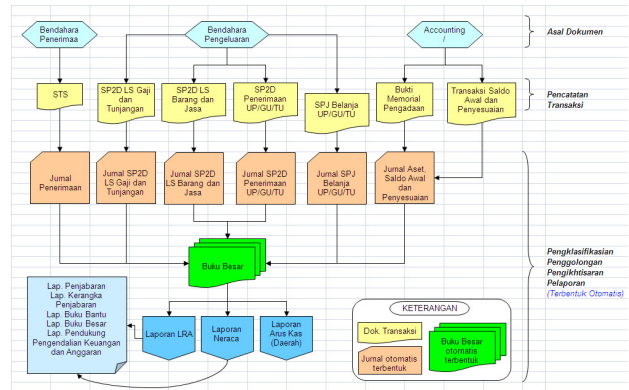
Tahap ini melakukan penerjemahan dari proses-proses yang terjadi dalam lingkup akuntansi keuangan daerah kedalam desain-desain sebagai berikut :

##### 4.1 Desain Transaksi

Berdasarkan hasil analisis proses bisnis yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, beberapa proses penting yang mendapat perhatian khusus dalam menyusun desain sistem informasinya adalah sebagai berikut :

- Terdapat pemisahan pengelolaan keuangan SKPD dan SKPKD.
- Meskipun ada pengelolaan yang terpisah, SKPKD juga berlaku sebagai koordinator laporan SKPD sehingga melakukan fungsi integrasi sistem akuntansi seluruh SKPD untuk menjadi laporan pemda.
- Sebelum diserahkan ke pembahasan DPRD, laporan yang kemudian disebut LK Pemda tersebut di audit oleh BPK.

Secara keseluruhan, proses bisnis yang diusulkan dalam sistem informasi akuntansi ini adalah sebagai yang tercantum pada block diagram berikut :



Gambar 5 : Alur sumber dokumen dan proses pencatatan

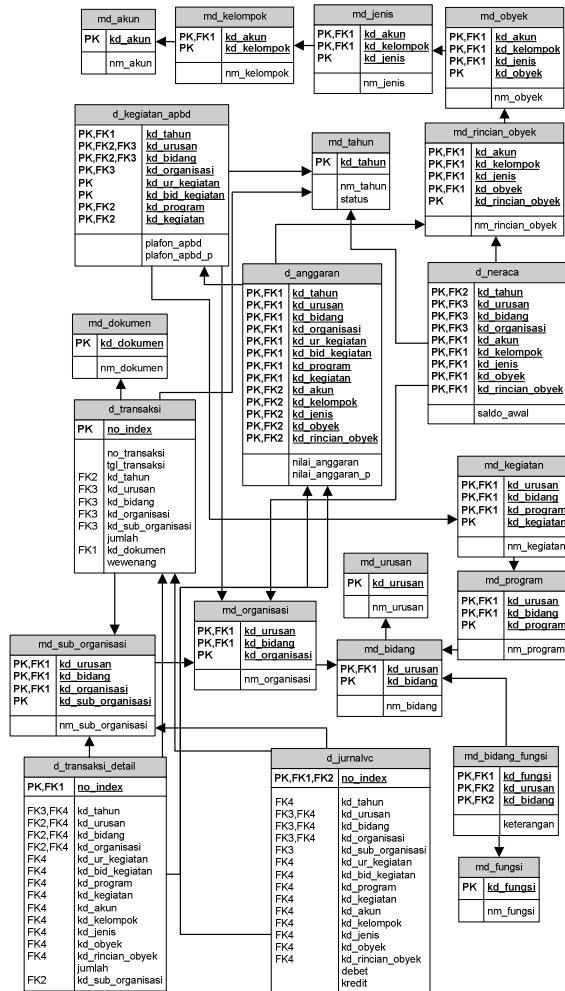
##### Keterangan

- ✓ STS, Surat Tanda Setoran
- ✓ SP2D LS, Surat Perintah Pencairan Dana Langsung.
- ✓ UP, uang persediaan adalah dana yang diberikan untuk belanja rutin dan dipertanggungjawabkan melalui surat pertanggungjawaban (SPJ-UP).
- ✓ GU, ganti uang adalah dana yang diminta untuk mengembalikan posisi UP setelah UP dipergunakan dalam SPJ-UP.
- ✓ TU, tambahan uang adalah dana tambahan yang diminta apabila UP tidak mencukupi.

##### 4.2 Desain Database

Database dalam komponen sistem informasi adalah aspek vital karena database adalah peta proses yang terjadi dalam bisnis yang akan dikembangkan. Strategi yang dikembangkan dalam pembuatan sistem informasi ini, seluruh prosedur dan fungsi-fungsi bisnis di tanam di database agar tidak ada proses interpretasi dari programmer saat men-develop software. Ini artinya jika ditemukan perubahan di sisi database, yang dirubah cukup prosedur dan fungsi yang ditanam, bukan script program yang ditulis oleh programmer.

Desain database system akuntansi keuangan daerah tersebut seperti tampak pada gambar berikut :



Gambar 6 : Desain database sistem informasi akuntansi

### 4.3 Desain Laporan

Laporan keuangan sebagai output dari sistem harus dapat memenuhi kebutuhan :

- Pelaporan keuangan SKPD, SKPKD dan Pemda.
- Pelaporan antar pejabat pengelola keuangan daerah.
- Alat audit internal sebelum laporan diserahkan ke BPK selaku auditor dan DPRD.
- Alat audit external, sistem harus mampu mengeluarkan seluruh data dalam bentuk file (doc, xls) yang diminta oleh auditor

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, laporan-laporan yang dibuat adalah sebagai berikut :

- Laporan SKPKD selaku daerah
  - Neraca daerah
  - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah sebelum konversi
  - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah setelah konversi
  - Neraca Saldo
  - Buku besar
  - Laporan jurnal

### b. Laporan SKPD

- Neraca SKPD
- LRA SKPD sebelum konversi
- LRA SKPD setelah konversi
- Neraca Saldo
- Buku besar
- Laporan jurnal

### c. Laporan pendukung

- Laporan semesteran
- Laporan buku besar per kegiatan
- Laporan buku besar belanja pemda
- Laporan buku bantu kas penerimaan dan pengeluaran
- Laporan triwulan
- Laporan per sub dinas

### d. Query

Adalah interface yang disediakan untuk meng-execute SQL untuk mengeluarkan data-data dari sistem melalui script SQL. Interface ini penting karena auditor umumnya meminta data-data pendukung yang belum tersedia di menu laporan sehingga data dapat dikeluarkan melalui perintah SQL.

## 5. APLIKASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAERAH

Aplikasi ini dibangun untuk digunakan oleh staf PPK-SKPD dan PPKD dalam melakukan pembukuan akuntansi. Sistem ini idealnya diinput oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran sebagai entitas dari nota keuangan.

Interface dan hasil jurnal yang dihasilkan tampak seperti gambar berikut :

### 5.1 Transaksi penerimaan STS

Gambar 7 : Form input penerimaan STS

Jurnal transaksi pendapatan adalah sebagai berikut :

Jurnal Transaksi	Referensi	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
001	1.20.03.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		700,000	0
001	1.20.03.4.1.10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		0	200,000
001	1.20.03.4.1.3.01.04	Bagian Laba PADAB Stawi		0	500,000
001	1.20.03.3.4.1.01.01	R/K Pemda		700,000	0
001	1.20.03.1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan		0	700,000

Gambar 8 : Jurnal penerimaan STS

## 5.2 Transaksi Belanja Gaji dan Tunjangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.394.252.560
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	222.067.880
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	174.025.000
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	20.910.000
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	165.130.000
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	152.262.000
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	60.177.309
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	54.301

Gambar 9 : Form Input Belanja Gaji dan Tunjangan

Jurnal transaksi belanja gaji dan tunjangan adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
1.20.1.20.03.00.00.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.188.779.050	0
1.20.1.20.03.00.00.3.4.1.01.01	R/K Pemda	0	3.188.779.050
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.394.252.560	0
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	222.067.880	0
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	174.025.000	0
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	20.910.000	0
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	165.130.000	0
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	152.262.000	0
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	60.177.309	0
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	54.301	0

Gambar 10 : Jurnal Belanja Gaji dan Tunjangan

## 5.3 Transaksi-transaksi lainnya adalah sebagai berikut :

- Transaksi SP2D LS barang dan jasa
- Transaksi penerimaan SP2D UP/GU/TU
- Transaksi SPJ / belanja GU/TU
- Transaksi pengembalian gaji
- Transaksi pengembalian LS
- Transaksi pengembalian sisa UP/TU
- Transaksi penyesuaian – Jurnal umum.

## 5.4 Orientasi Kemandirian Audit

Kemandirian audit dalam penelitian ini diletakkan pada :

- Desain database dengan memecah seluruh kode kedalam bentuk atomik (bentuk terkecil) agar kedalaman detail data dapat ditampilkan untuk keperluan audit.
- Output yang disediakan tidak hanya yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan, lebih dari itu disediakan pula laporan-laporan detail untuk pemeriksaan nilai-nilai laporan keuangan akhir dengan detail-detail buku bantu dan bukti bendahara.
- Dibuat form query SQL yang tampilannya dapat di export ke dalam format xls.

## 6. SIMPULAN

Hasil dari analisis dan aplikasi yang dikembangkan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

- Implementasi sistem informasi akuntansi ini memudahkan staf pengelola keuangan dalam

melakukan pencatatan akuntansi berbasis transaksional sehingga petugas tidak lagi mencatat dalam bentuk double entri (jurnal umum). Sehingga tanpa harus menguasai akuntansi sekalipun diharapkan petugas dapat melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah.

- Terbentuknya laporan akhir secara otomatis berikut dengan buku bantu jurnal, buku besar dan laporan-laporan pendukung lainnya memudahkan PPK-SKPD / PPKD yang paling bertanggungjawab dalam laporan keuangan dapat dengan mudah melakukan auditing secara mandiri sebelum laporan tersebut diaudit oleh auditor external.

Dibuatnya fasilitas Query SQL dapat menjembatani permintaan auditor terhadap data-data yang sudah tersimpan dalam sistem akan tetapi tidak ada di laporan.

## PUSTAKA

Bastian Indra, *Audit Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat, 2007

Marshall B. Roomney, Paul John Steinbart, *Accounting Information Systems*, Jakarta : Salemba Empat, 2004

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*, Jakarta : 2003

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara*, Jakarta : 2004

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta : 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta : 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008 tentang *Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya*, Jakarta : 2008

Raymond, McLeod., *Management Information System & Study of Computer Based Information System*, New Jersey : Prentice-Hall Inc, 2001.